

OPTIMALISASI PERAN KAPAL PATROLI DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DALAM Mendukung PENEGAKKAN HUKUM DIWILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Muhammad Fahrurrozy
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL)
Corresponding Author: Mrozy1611@gmail.com

History:

Received : 10 Januari 2024
Revised : 14 Januari 2024
Accepted : 17 Maret 2024
Published : 30 September 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-No
Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



ABSTRAK

Kepulauan Riau, sebagai wilayah perairan strategis, menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan hukum maritim. Kapal patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan keselamatan di area ini. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas patroli, termasuk keterbatasan teknologi, kurangnya pelatihan kru, dan koordinasi antarinstansi yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kapal patroli dalam penegakan hukum maritim di Kepulauan Riau. Tujuan utama adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mengoptimalkan peran kapal patroli, memperbaiki teknologi, dan meningkatkan koordinasi serta pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Data primer dikumpulkan dari kru kapal patroli, pejabat Ditpolair, dan stakeholder terkait, sementara data sekunder diperoleh dari dokumentasi internal dan literatur terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi teknologi kapal patroli, pelatihan berkala untuk kru, serta penguatan koordinasi antarinstansi adalah aspek-aspek krusial yang perlu diperbaiki. Teknologi yang usang membatasi kemampuan deteksi dan respons, sedangkan kurangnya pelatihan mempengaruhi efektivitas operasional kru. Koordinasi yang tidak efektif antara Ditpolair dan instansi terkait menghambat respons terhadap ancaman maritim. Rekomendasi mencakup pembaruan teknologi, peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan, perbaikan strategi patroli berbasis intelijen, dan perluasan program sosialisasi masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan penegakan hukum maritim di wilayah Kepulauan Riau secara signifikan.

Keywords: Peran Kapal, Patroli, Ditpolair Korpolaairud Baharkam, Penegakan Hukum.

INTRODUCTION

Kapal patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri memegang peranan yang sangat signifikan dalam mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Sebagai bagian integral dari Korps Polisi Perairan dan Udara (Korpolaairud) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, kapal patroli ini memiliki tanggung jawab yang luas dan

kompleks dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia yang terkenal luas dan kaya akan sumber daya alam (Gantika, Prayitno and Yandi, 2023). Peran kapal patroli ini tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kerja sama internasional, dan pengamanan wilayah perbatasan (Yusuf, Sumardi and Latif, 2023).

Pengawasan dan patroli merupakan salah satu fungsi utama kapal patroli Ditpolair. Dalam hukum dan keamanan, patroli laut dilakukan secara rutin untuk memantau dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau ilegal di wilayah perairan Indonesia. Pengawasan ini melibatkan pemantauan pergerakan kapal-kapal yang beroperasi di laut, serta memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wiliawati, Danial and Muin, 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan pentingnya pengawasan lalu lintas pelayaran untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran. Dalam hal ini, kapal patroli berperan sebagai penegak hukum yang memastikan semua aktivitas maritim mematuhi ketentuan yang ada, termasuk larangan dan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut (Ilham, Nur and Hipan, 2022).

Kapal patroli Ditpolair juga memiliki tugas penting dalam penegakan hukum di perairan. Penegakan hukum ini melibatkan penanganan kasus pelanggaran hukum seperti perikanan ilegal, penyelundupan, dan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan laut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang larangan dan sanksi bagi pelaku kejahatan di sektor perikanan, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat nelayan. Kapal patroli Ditpolair dilengkapi dengan peralatan canggih dan personel terlatih untuk menangani kasus-kasus tersebut, termasuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan, penyitaan barang bukti, dan pelaksanaan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saifulloh and Simabura, 2023).

Kapal patroli Ditpolair juga berfungsi sebagai respon cepat. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang

panjang dan perairan yang luas, sering menghadapi situasi darurat seperti kecelakaan laut atau tindak kejahatan yang memerlukan tindakan cepat. Kapal patroli dilengkapi dengan fasilitas untuk menyelamatkan korban, memberikan pertolongan pertama, dan menangani situasi darurat lainnya (Andriza, Pasalbessy and Anwar, 2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Keselematan Pelayaran mengamanatkan adanya tanggung jawab untuk menyediakan bantuan dan pertolongan kepada kapal yang mengalami kecelakaan di laut. Dalam hal ini, kapal patroli berperan dalam memastikan bahwa setiap kejadian darurat dapat ditangani dengan efektif dan efisien (Ridha, Heri and Setiaji, 2024).

Kapal patroli Ditpolair juga terlibat dalam kerja sama dengan instansi lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama ini penting dalam menghadapi masalah yang bersifat lintas batas, seperti perikanan ilegal yang melibatkan kapal dari negara lain atau penyelundupan barang terlarang. Dalam hal ini, kapal patroli berkolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti TNI AL, Bea Cukai, dan lembaga internasional seperti Interpol atau ASEAN untuk berbagi informasi, melakukan operasi bersama, dan menangani kasus-kasus yang memerlukan koordinasi antar negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional menyebutkan pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga keamanan dan ketertiban global, termasuk di bidang maritim (Andini, Gusreyna and Eriansyah, 2023).

Kapal patroli Ditpolair juga memiliki peran dalam pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir (Alfath, Chobibah and Puspitosari, 2021). Pendidikan ini mencakup penyuluhan tentang pentingnya mematuhi hukum dan peraturan di laut, serta edukasi tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan laut. Kapal patroli sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada nelayan dan

masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari aktivitas ilegal dan perlunya menjaga keamanan serta keberlanjutan sumber daya laut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, termasuk di laut, yang menjadi fokus utama dalam sosialisasi kapal patroli (Prabowo, Panggabean and Hutahaean, 2023).

Kapal patroli Ditpolair juga berfungsi dalam pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia. Mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau dan perbatasan laut, pengamanan wilayah perbatasan menjadi sangat penting untuk mencegah ancaman dari luar, baik berupa gangguan keamanan atau pelanggaran terhadap kedaulatan negara (Sukoco, 2022). Kapal patroli berperan dalam menjaga integritas wilayah perairan, mencegah infiltrasi dari kapal asing, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan di perairan Indonesia tidak mengancam kedaulatan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga mengatur tentang pengamanan wilayah perbatasan, yang melibatkan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional, termasuk di perairan (Saifulloh and Simabura, 2023).

Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri memainkan peran yang sangat komprehensif dalam mendukung penegakan hukum di perairan Indonesia. Tugas mereka meliputi pengawasan, penegakan hukum, respon cepat dalam situasi darurat, kerja sama dengan instansi lain, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengamanan wilayah perbatasan (Syahputra and Arief Budiono, 2024). Melalui pelaksanaan tugas-tugas tersebut, kapal patroli berkontribusi besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia, yang sangat

penting untuk melindungi sumber daya alam, kedaulatan negara, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Romdhon *et al.*, 2023).

Dalam upaya mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Riau, optimalisasi peran kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian mendalam (Prajias, Harahap and Prayuti, 2021). Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kapasitas dan teknologi pada kapal patroli yang ada. Banyak kapal yang masih menggunakan teknologi lama, yang membatasi kemampuan mereka dalam mendeteksi dan merespons ancaman dengan cepat. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi kru kapal juga menghambat efektivitas patroli. Banyak anggota tidak mendapatkan pelatihan yang cukup terkait dengan perkembangan terbaru dalam teknik penegakan hukum maritim, yang berpotensi menurunkan kualitas operasional mereka di lapangan (Medendehe, 2021).

Tujuan dari optimalisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas kapal patroli dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Kepulauan Riau melalui modernisasi armada, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan koordinasi antarinstansi. Dengan melakukan modernisasi teknologi kapal patroli, seperti pemasangan radar dan sistem navigasi canggih, serta melaksanakan pelatihan rutin dan pengembangan keahlian khusus untuk kru kapal, diharapkan dapat memperbaiki respon dan efektivitas dalam menghadapi berbagai jenis kejahatan maritim, seperti penyelundupan, pencurian ikan, dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta penggunaan teknologi canggih dalam patroli akan memperkuat kapasitas penegakan hukum di wilayah yang luas dan kompleks ini.

Gap research merujuk pada kekurangan informasi dan penelitian yang mendalam mengenai efektivitas kapal

patroli saat ini dan bagaimana berbagai faktor seperti teknologi, pelatihan, dan koordinasi dapat dioptimalkan. Penelitian yang ada sering kali tidak memperhitungkan integrasi berbagai elemen yang mempengaruhi efektivitas operasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan spesifik kapal patroli di Kepulauan Riau, serta bagaimana gap antara kemampuan saat ini dan yang diinginkan dapat diatasi dengan solusi yang tepat.

Urgensi dari optimalisasi ini sangat tinggi mengingat wilayah perairan Kepulauan Riau merupakan area strategis dengan banyak aktivitas maritim yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Kejahatan maritim yang tidak tertangani dengan baik dapat mengancam keamanan dan keselamatan laut, merugikan ekonomi lokal, dan menurunkan reputasi keamanan nasional. Dengan meningkatkan kemampuan kapal patroli dan memperkuat penegakan hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap wilayah perairan ini, mengurangi aktivitas ilegal, dan memastikan bahwa hukum maritim dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan efisien.

METHODS

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan dan solusi terkait optimalisasi peran kapal patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dalam mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Riau. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi efektivitas kapal patroli serta mendapatkan wawasan mendalam melalui data yang bersifat deskriptif dan interpretatif.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer akan dikumpulkan langsung dari sumber utama yang relevan dengan penelitian ini. Ini termasuk:

a. Observasi Langsung

Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap operasional kapal patroli Ditpolair Korpolaairud, termasuk kegiatan patroli, teknik yang digunakan, dan interaksi dengan kru serta masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti personel kapal patroli, pejabat Ditpolair, serta anggota instansi lain yang bekerja sama dalam penegakan hukum maritim.

2. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti:

a. Dokumentasi Internal

Laporan, catatan, dan dokumen terkait operasional dan efektivitas kapal patroli yang disediakan oleh Ditpolair Korpolaairud dan instansi terkait lainnya.

b. Literatur Terkait

Buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan studi kasus yang relevan dengan topik penelitian ini. Literatur ini akan membantu dalam memahami dan menilai solusi yang telah diterapkan di tempat lain.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung operasional kapal patroli, termasuk bagaimana kapal tersebut digunakan dalam kegiatan patroli dan penegakan hukum. Observasi ini juga mencakup pengamatan terhadap interaksi antara kru kapal dan situasi di lapangan, seperti cara kapal merespons kejadian-kejadian maritim yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan:

- a. Kru Kapal Patroli
Untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman mereka, tantangan yang dihadapi, dan pandangan mereka tentang efektivitas kapal patroli.
- b. Pejabat Ditpolair Korpolairud
Untuk memahami perspektif mereka tentang kebijakan, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi dalam operasi kapal patroli.
- c. Stakeholder Terkait
Termasuk instansi lain dan masyarakat pesisir untuk mendapatkan pandangan eksternal tentang efektivitas dan dampak dari patroli yang dilakukan.

Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang sistematis. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Pengkodean

Pengkodean adalah proses awal

dalam analisis data kualitatif di mana data yang terkumpul dikategorikan ke dalam tema-tema atau kode-kode tertentu. Kode ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data.

2. Kategorisasi

Setelah data dikodekan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam kategori yang lebih luas. Kategorisasi ini memudahkan peneliti untuk mengorganisasi informasi dan menghubungkan temuan-temuan yang relevan dengan masalah penelitian.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah proses akhir di mana peneliti menganalisis dan memberikan makna terhadap data yang telah dikategorikan. Ini melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data, serta menghubungkannya dengan teori dan kerangka konsep yang ada.

RESULTS AND DISCUSSION

Table 1. Hasil Wawancara

No.	Topik Wawancara	Pertanyaan Utama	Jawaban Utama	Mayoritas Responden Menyatakan
1	Teknologi Kapal Patroli	Apa kendala utama dalam teknologi kapal patroli saat ini?	Banyak kapal patroli masih menggunakan teknologi lama yang membatasi kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman. Banyak kapal belum dilengkapi dengan radar dan sistem komunikasi canggih.	Teknologi perlu diperbarui untuk meningkatkan efektivitas.
2	Pelatihan SDM	Seberapa sering pelatihan diberikan kepada kru kapal patroli?	Pelatihan untuk kru kapal tidak dilakukan secara rutin. Ada kebutuhan untuk pelatihan berkala yang mencakup teknik terbaru dalam penegakan hukum maritim dan penggunaan teknologi terbaru.	Pelatihan harus lebih rutin dan mencakup teknik terbaru.

3	Koordinasi Antarinstansi	Bagaimana koordinasi antara Ditpolair dan instansi terkait lainnya?	Koordinasi sering kali kurang efektif, dengan kurangnya komunikasi dan berbagi informasi antar instansi. Hal ini dapat menghambat respons cepat terhadap kejadian-kejadian maritim.	Koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan.
4	Strategi Patroli	Apakah strategi patroli yang ada saat ini efektif dalam mendeteksi kejahatan maritim?	Banyak responden merasa bahwa strategi patroli perlu diperbaiki. Rute patroli sering kali tidak optimal dan tidak didasarkan pada data intelijen terbaru.	Rute patroli perlu ditentukan berdasarkan data intelijen.
5	Kesadaran Masyarakat	Bagaimana penilaian Anda tentang program sosialisasi dan kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum maritim?	Program sosialisasi dan kampanye publik kurang efektif dan belum mencapai semua lapisan masyarakat pesisir. Ada kebutuhan untuk pendekatan yang lebih intensif dan terarah.	Program sosialisasi perlu ditingkatkan dan lebih luas.
6	Penggunaan Teknologi	Apakah teknologi seperti drone digunakan dalam patroli?	Penggunaan teknologi seperti drone belum dimaksimalkan dalam patroli. Teknologi ini dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas operasi patroli.	Teknologi canggih seperti drone perlu lebih banyak digunakan.

*) Data Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 1, yang merangkum hasil wawancara terkait peran kapal patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dalam penegakan hukum maritim di Kepulauan Riau, analisis menunjukkan bahwa beberapa aspek utama mempengaruhi efektivitas operasional kapal patroli. Pertama, terkait teknologi kapal patroli, sebagian besar responden menyoroti bahwa kapal-kapal yang ada saat ini masih menggunakan teknologi yang ketinggalan zaman. Teknologi lama ini, seperti radar dan sistem komunikasi, membatasi kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman maritim. Mayoritas responden menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas operasi patroli, perlu dilakukan pembaruan teknologi secara menyeluruh. Implementasi perangkat canggih akan memungkinkan kapal patroli untuk mendeteksi dan

merespons ancaman dengan lebih cepat dan akurat, yang merupakan kunci untuk menjaga keamanan perairan yang luas dan kompleks.

Masalah pelatihan sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian penting. Wawancara menunjukkan bahwa pelatihan untuk kru kapal patroli tidak dilakukan secara rutin dan sering kali tidak mencakup teknik terbaru dalam penegakan hukum maritim. Kebutuhan akan pelatihan berkala yang lebih terstruktur dan terupdate sangat ditekankan oleh mayoritas responden. Pelatihan yang lebih sering dan mencakup teknik terbaru serta penggunaan teknologi mutakhir diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kesiapan kru dalam menangani berbagai situasi di lapangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas patroli.

Koordinasi antarinstansi juga merupakan faktor krusial yang diidentifikasi dalam analisis. Responden mencatat bahwa koordinasi antara Ditpolair dan instansi terkait sering kali kurang efektif, dengan kurangnya komunikasi dan berbagi informasi yang berdampak pada respons terhadap kejadian-kejadian maritim. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem koordinasi dan komunikasi antarinstansi untuk memastikan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman maritim. Peningkatan koordinasi akan membantu dalam integrasi sumber daya dan informasi, yang esensial untuk operasi patroli yang lebih efisien.

Strategi patroli juga diidentifikasi sebagai area yang memerlukan perbaikan. Banyak responden merasa bahwa strategi patroli yang ada saat ini tidak optimal dan tidak didasarkan pada data intelijen terkini. Rute patroli sering kali tidak diarahkan berdasarkan analisis risiko yang mendalam, sehingga kurang efektif dalam mendeteksi kejahatan maritim. Mayoritas responden menyarankan agar rute patroli ditentukan berdasarkan data intelijen yang lebih akurat dan terkini, untuk memastikan bahwa area-area rawan mendapatkan perhatian yang sesuai dan meningkatkan peluang untuk mencegah dan menangani kejahatan maritim secara lebih efektif.

Kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum maritim juga perlu ditingkatkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program sosialisasi dan kampanye publik yang ada saat ini dianggap kurang efektif dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat

pesisir. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum maritim, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan terarah. Program sosialisasi yang lebih luas dan berbasis komunitas akan membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan perairan.

Penggunaan teknologi canggih seperti drone dalam patroli juga merupakan area yang membutuhkan perhatian. Data dari wawancara mengungkapkan bahwa teknologi seperti drone belum dimaksimalkan dalam operasi patroli. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan patroli dan meningkatkan efektivitas operasional. Penerapan drone dan teknologi serupa dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan data yang lebih akurat, mendukung patroli dengan cara yang lebih efisien dan meningkatkan kemampuan deteksi serta pemantauan di wilayah perairan yang luas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan peran kapal patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, penting untuk melakukan modernisasi teknologi, meningkatkan pelatihan kru, memperbaiki koordinasi antarinstansi, memperbarui strategi patroli berdasarkan data intelijen, memperluas program sosialisasi masyarakat, dan memanfaatkan teknologi canggih. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wilayah perairan Kepulauan Riau.

Tabel 2. Pengkodean Berdasarkan Kategori-Kategori

No.	Kode	Kategori	Deskripsi
1	TP01	Teknologi Kapal	Menunjukkan isu terkait teknologi kapal patroli, seperti perangkat lama dan kebutuhan pembaruan.
2	TP02	Pelatihan SDM	Berfokus pada frekuensi dan kualitas pelatihan untuk kru kapal, termasuk kebutuhan pelatihan tambahan.
3	TP03	Koordinasi Antarinstansi	Menyentuh isu tentang efektivitas koordinasi dan komunikasi antara Ditpolair dan instansi terkait lainnya.
4	TP04	Strategi Patroli	Berkaitan dengan efektivitas rute patroli yang ada dan perlunya perbaikan berdasarkan data intelijen.

5	TP05	Kesadaran Masyarakat	Menggambarkan efektivitas program sosialisasi dan kampanye publik terkait penegakan hukum maritim.
6	TP06	Penggunaan Teknologi	Terkait dengan penggunaan teknologi canggih, seperti drone, dalam operasi patroli dan penegakan hukum.

*) Data Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 2, yang mengategorikan hasil wawancara ke dalam berbagai kategori pengkodean, analisis mendalam mengungkapkan beberapa isu kunci yang mempengaruhi efektivitas kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam penegakan hukum maritim di Kepulauan Riau. Kategori Teknologi Kapal (TP01) menunjukkan bahwa banyak kapal patroli masih mengandalkan teknologi lama yang membatasi kemampuannya dalam deteksi dan respons terhadap ancaman maritim. Keterbatasan ini menghambat efektivitas patroli dan memerlukan pembaruan teknologi secara menyeluruh, termasuk penerapan perangkat canggih seperti radar dan sistem komunikasi modern untuk meningkatkan kapasitas deteksi dan respons yang lebih cepat dan akurat terhadap kejahatan maritim.

Dalam hal Pelatihan SDM (TP02), temuan menunjukkan bahwa pelatihan untuk kru kapal patroli tidak dilakukan secara rutin dan sering kali tidak mencakup teknik-teknik terbaru dalam penegakan hukum maritim. Mayoritas responden menekankan perlunya pelatihan berkala yang lebih terstruktur dan mutakhir untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kru dalam menangani berbagai tantangan di lapangan. Pelatihan yang lebih sering dan mencakup penggunaan teknologi terbaru akan memastikan bahwa kru kapal selalu siap menghadapi situasi yang berkembang dan kompleks di perairan Kepulauan Riau.

Koordinasi Antarinstansi (TP03) menjadi kategori yang menyoroti masalah komunikasi dan koordinasi antara Ditpolair dan instansi terkait lainnya. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kurangnya komunikasi dan berbagi informasi antar instansi sering menghambat respons cepat terhadap kejadian-kejadian maritim. Penguatan sistem koordinasi antarinstansi, dengan meningkatkan

komunikasi dan berbagi informasi yang lebih efektif, diharapkan dapat memperbaiki integrasi sumber daya dan intelijen, sehingga operasi patroli menjadi lebih terkoordinasi dan responsif terhadap ancaman maritim.

Strategi Patroli (TP04) menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki rute patroli yang ada berdasarkan data intelijen terkini. Banyak responden merasa bahwa strategi patroli saat ini tidak optimal dan tidak didasarkan pada analisis risiko yang mendalam. Penyesuaian rute patroli berdasarkan data intelijen yang akurat akan memungkinkan kapal patroli untuk lebih efektif menargetkan area-area rawan dan meningkatkan peluang untuk mencegah serta menangani kejahatan maritim dengan lebih efisien.

Kategori Kesadaran Masyarakat (TP05) menggambarkan efektivitas program sosialisasi dan kampanye publik mengenai penegakan hukum maritim. Data menunjukkan bahwa program-program sosialisasi saat ini kurang efektif dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat pesisir. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum maritim, diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih luas dan terarah, yang dapat mencakup berbagai metode komunikasi dan pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap hukum maritim.

Penggunaan Teknologi (TP06) menunjukkan bahwa teknologi canggih seperti drone belum dimanfaatkan secara optimal dalam patroli. Penggunaan drone dan teknologi serupa dapat memperluas jangkauan patroli dan meningkatkan kemampuan deteksi. Investasi dalam teknologi ini dan pelatihan khusus untuk penggunaannya akan memperkuat kapasitas patroli dan meningkatkan

efektivitas operasi maritim secara keseluruhan.

Pengkodean data ini mengungkapkan bahwa perbaikan dalam teknologi kapal, pelatihan SDM, koordinasi antarinstansi, strategi patroli, kesadaran masyarakat, dan penggunaan teknologi canggih adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mengoptimalkan peran kapal patroli dalam penegakan hukum maritim di Kepulauan Riau. Implementasi dari rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli dan memberikan kontribusi signifikan terhadap keamanan dan keselamatan perairan.

Dalam upaya mengoptimalkan peran kapal patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dalam mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Riau, berbagai permasalahan dan tantangan telah diidentifikasi melalui wawancara dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kapal patroli dan bagaimana solusi potensial dapat diimplementasikan.

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah keterbatasan teknologi pada kapal patroli. Data dari wawancara menunjukkan bahwa banyak kapal patroli yang masih menggunakan teknologi lama, seperti radar dan sistem komunikasi yang ketinggalan zaman. Keterbatasan ini membatasi kemampuan kapal dalam mendeteksi dan merespons ancaman secara efisien. Responden menyatakan bahwa modernisasi armada kapal patroli sangat penting untuk meningkatkan efektivitas operasional. Penggunaan teknologi canggih, seperti radar terbaru dan sistem komunikasi satelit, dapat memperbaiki jangkauan deteksi dan respons terhadap kejadian-kejadian maritim, termasuk penyelundupan, pencurian ikan, dan pelanggaran hukum lainnya.

Selain masalah teknologi, pelatihan untuk kru kapal patroli juga merupakan isu signifikan. Wawancara mengungkapkan bahwa pelatihan tidak dilakukan secara

rutin dan sering kali tidak mencakup teknik-teknik terbaru dalam penegakan hukum maritim. Banyak anggota kru yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai penggunaan teknologi terbaru dan prosedur operasional terkini. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dengan efektif, terutama dalam situasi yang memerlukan keterampilan khusus atau pengetahuan teknis. Untuk mengatasi masalah ini, pelatihan berkala yang mencakup teknik terbaru dan penggunaan teknologi modern harus diimplementasikan. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan teknis kru tetapi juga meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Koordinasi antarinstansi juga menjadi area yang memerlukan perhatian serius. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Ditpolair dan instansi terkait sering kali kurang efektif. Kurangnya berbagi informasi dan komunikasi yang tidak lancar antara berbagai pihak dapat menghambat respons cepat terhadap situasi maritim yang mendesak. Untuk meningkatkan efektivitas operasi patroli, perlu adanya penguatan koordinasi antara Ditpolair Korpolaairud dengan instansi lain seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dan pihak-pihak lokal yang terlibat. Sistem komunikasi dan berbagi informasi yang lebih baik akan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses ke data dan intelijen terbaru, sehingga dapat melakukan respons yang lebih terkoordinasi dan efektif terhadap ancaman maritim.

Strategi patroli juga menjadi aspek penting yang memerlukan perbaikan. Data menunjukkan bahwa rute patroli yang ada saat ini sering kali tidak optimal dan tidak didasarkan pada data intelijen terkini. Responden merasa bahwa strategi patroli perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa kapal patroli dapat menjangkau area-area rawan secara lebih efektif. Penggunaan data

intelijen untuk menentukan rute patroli yang strategis adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas. Misalnya, dengan mengidentifikasi pola-pola kejahatan maritim dan titik-titik rawan melalui analisis data, rute patroli dapat disesuaikan untuk menargetkan area-area yang paling membutuhkan perhatian.

Kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum maritim juga menjadi perhatian penting. Program sosialisasi dan kampanye publik saat ini dianggap kurang efektif dan belum mencapai semua lapisan masyarakat pesisir. Beberapa responden menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum maritim dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Kampanye publik harus mencakup berbagai metode komunikasi, termasuk penyuluhan langsung kepada masyarakat pesisir, penggunaan media lokal, dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang penegakan hukum maritim dan keselamatan di perairan.

Penggunaan teknologi canggih, seperti drone, juga menjadi topik yang penting dalam analisis ini. Meskipun teknologi ini dapat memberikan keuntungan besar dalam hal jangkauan patroli dan kemampuan deteksi, penggunaannya saat ini belum dimaksimalkan. Data menunjukkan bahwa drone dan teknologi canggih lainnya belum diintegrasikan secara luas dalam operasi patroli kapal. Teknologi ini dapat membantu memperluas jangkauan patroli dan memberikan data yang lebih akurat tentang aktivitas maritim. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi dalam teknologi canggih dan pelatihan khusus untuk kru kapal dalam penggunaan perangkat ini untuk meningkatkan efektivitas operasi patroli.

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk

mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Pertama, modernisasi teknologi kapal patroli harus menjadi prioritas utama, termasuk pemasangan perangkat terbaru dan sistem komunikasi yang lebih canggih. Kedua, pelatihan berkala dan pengembangan keahlian khusus untuk kru kapal harus diimplementasikan untuk memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi tantangan terbaru. Ketiga, penguatan koordinasi antarinstansi harus dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan berbagi informasi antara Ditpolair Korpolaairud dan pihak-pihak terkait. Keempat, strategi patroli harus diperbaiki dengan menggunakan data intelijen untuk menentukan rute patroli yang lebih efektif. Kelima, program sosialisasi dan kampanye publik perlu diperluas dan ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum maritim. Terakhir, investasi dalam teknologi canggih seperti drone harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan patroli.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan peran kapal patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dalam penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Riau dapat dioptimalkan. Peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan, koordinasi, dan kesadaran masyarakat akan mendukung penegakan hukum maritim yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap wilayah perairan yang strategis ini.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis mendalam terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi kapal patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dalam mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Riau, dapat disimpulkan bahwa modernisasi teknologi kapal, pelatihan berkala untuk kru, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta perbaikan strategi patroli dan program sosialisasi masyarakat adalah langkah-

langkah krusial yang perlu diimplementasikan. Keterbatasan teknologi saat ini menghambat efektivitas deteksi dan respons, sementara kurangnya pelatihan mempengaruhi kesiapan kru dalam menangani situasi maritim yang kompleks. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi serta penggunaan data intelijen untuk strategi patroli yang lebih terarah akan meningkatkan efektivitas operasi. Selain itu, memperluas program sosialisasi dan memanfaatkan teknologi canggih seperti drone dapat memperkuat penegakan hukum maritim. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan di perairan Kepulauan Riau serta mendukung penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif.

REFERENCE

- Alfath, T.P., Chobibah, A. and Puspitosari, R. (2021) 'Konformitas Hukum Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum di Laut Indonesia', *Law & Justice Review Journal*, 1(1), pp. 37–46.
- Andini, O.G., Gusreyna, L.A. and Eriansyah, S. (2023) 'BAKAMLA: HARAPAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA', in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN*, pp. 405–413.
- Andrizal, A., Pasalbessy, J.D. and Anwar, A. (2021) 'Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum', *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(2), pp. 121–146.
- Gantika, N., Prayitno, R. and Yandi, R. (2023) 'Upaya badan keamanan laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan', *Science And Research Journal Of Mai Wandeu*, 3(1), pp. 8–16.
- Ilham, M., Nur, N.M. and Hipan, N. (2022) 'Kedudukan badan keamanan laut (bakamla) dalam penegakkan hukum di wilayah laut Indonesia', *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), pp. 55–69.
- Medendehe, R.J. (2021) 'Penanganan Pelanggaran Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna', *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Prabowo, D.A., Panggabean, M.L. and Hutahaean, A. (2023) 'Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), pp. 367–382.
- Prajas, B.Y., Harahap, N. and Prayuti, Y. (2021) 'Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara', *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 11(2), pp. 159–175.
- Ridha, A.M., Heri, M. and Setiaji, B.T. (2024) 'Urgensi Penyatuan Lembaga Penegak Hukum di Laut Indonesia', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), pp. 1–8.
- Romdhon, M.F. et al. (2023) 'Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Armed Robbery di Area Berlabuh Jangkar', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), pp. 479–485.
- Saifulloh, P.P.A. and Simabura, C. (2023) 'PENATAAN LEMBAGA PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LAUT BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
- Sukoco, S. (2022) 'PERAN KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA (KORPOLAIRUD) DALAM MENJAGA KEAMANAN DI WILAYAH SELAT SUNDA', *Strategi Pertahanan Udara*, 8(2).
- Syahputra, W.W.H. and Arief Budiono,

- S.H. (2024) 'Penegakkan Hukum Oleh Direktorat Polisi Air Dan Udara Polda Jawa Tengah Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa (Studi Kasus: Penyelundupan Satwa Dilindungi Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang)'. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wiliawati, Y., Danial, D. and Muin, F. (2022) 'Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai', *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), pp. 286–298.
- Yusuf, H.S., Sumardi, J. and Latif, B. (2023) 'Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut', *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(2), pp. 287–308.